

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI MADRASAH ALIYAH SWASTA KOTA GORONTALO: (*Antara Harapan dan Realita*)

Herson Anwar & Lian G. Ota

State Islamic Institute (IAIN) Sultan Amai Gorontalo, Celebes, Indonesia

Correspondensi: herson.anwar@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi pengelolaan keuangan dan pembiayaan pendidikan di Madrasah Aliyah Swasta Kota Gorontalo. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Hasil temuan menunjukkan bahwa keuangan dan pembiayaan bukan menjadi faktor utama dalam menunjang eksistensi Madrasah Aliyah Swasta di Kota Gorontalo, tetapi keterbatasan keuangan akan menjadi faktor penghambat bagi madrasah dalam mengembangkan dirinya di era persaingan yang semakin kompetitif saat ini. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan dan pembiayaan yang baik dalam hal menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS), mengidentifikasi sumber dana/menggali dana eksternal maupun internal, merealisasikan dana sesuai dengan rencana, pertanggungjawaban keuangan dan evaluasi anggaran sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan sangat dibutuhkan. Hal ini penting dalam memudahkan Madrasah Aliyah Swasta di Kota Gorontalo untuk menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik yang dimilikinya.

Kata Kunci: Pengelolaan, Keuangan, Pembiayaan Pendidikan, Madrasah.

PENDAHULUAN

Pendidikan saat ini masih menghadapi permasalahan-permasalahan, khususnya pendidikan Islam. Sebagian besar lembaga pendidikan Islam salah satunya Madrasah Aliyah masih menghadapi problem internal kelembagaan sementara tantangan yang dihadapi semakin berat. Idealnya Madrasah Aliyah harus didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, berdedikasi, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan zaman, sehingga berkembang dengan baik sesuai dengan aturan dan sistem yang berlaku (Nugraha & Rohayani, 2016).

Permasalahan krusial yang dihadapi madrasah saat ini adalah masyarakat cenderung memilih menyekolahkan anaknya di sekolah umum dibanding madrasah. Fenomena ini justru berbanding terbalik dengan jumlah penduduk Gorontalo yang mayoritas beragama Islam ($\pm 95\%$). Hal ini menunjukkan rendahnya minat masyarakat Gorontalo terhadap madrasah.

Adanya keraguan mutu pendidikan di madrasah menjadikan madrasah dipandang pilihan kedua oleh orang tua dalam menyekolahkan anaknya. Selain itu, menurut *Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership* (2013:7) bahwa pemangku kepentingan dalam pendidikan memiliki pandangan yang berbeda tentang pengelolaan pendidikan madrasah yang bersifat desentralisasi atau terpusat. Melihat kondisi seperti ini, tentu madrasah tidak boleh hanya berpangku tangan atau pasrah menerima kenyataan. Oleh karena itu, madrasah harus berbenah diri untuk menepis anggapan yang kurang menguntungkan bagi madrasah.

Peningkatan mutu pendidikan madrasah bukanlah tugas yang ringan karena tidak hanya berkaitan dengan permasalahan teknis, tetapi mencakup berbagai persoalan yang sangat rumit dan kompleks, yang menyangkut masalah perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan perbaikan sehingga terciptanya pendidikan yang efektif dan efisien. Untuk mencapai pendidikan madrasah yang bermutu sangat membutuhkan sebuah

pengelolaan yang baik dengan melibatkan semua komponen yang ada di dalamnya, salah satunya pengelolaan keuangan dan pembiayaan yang sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan.

Komponen keuangan madrasah merupakan komponen yang menentukan terlaksananya kegiatan pembelajaran bersama komponen-komponen lain. Dengan kata lain, setiap kegiatan yang dilakukan sekolah/madrasah memerlukan biaya. Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, perlu dialokasikan dana khusus yang antara lain untuk keperluan kegiatan identifikasi input siswa, modifikasi kurikulum, insentif bagi tenaga kependidikan yang terlibat, pengadaan sarana prasarana, pemberdayaan peran serta masyarakat, dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran.

Pengelolaan keuangan di madrasah terutama berkenaan dengan kiat sekolah/madrasah dalam menggali dana, mengelola dana. Pengelolaan keuangan dikaitkan dengan program tahunan sekolah, cara mengadministrasikan dana sekolah/madrasah, dan cara melakukan pengawasan, pengendalian, serta pemeriksaan (Rusman, 2011:129). Pengelolaan keuangan di madrasah dikaitkan dengan program tahunan sekolah/madrasah, cara mengadministrasikan dana madrasah, dan cara melakukan pengawasan, pengendalian serta pemeriksaan keuangan di sekolah/madrasah.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan madrasah menganut asas pemisahan tugas antara fungsi-fungsi yaitu otorisator, ordonator dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang serta diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban.

Kepala sekolah/madrasah, sebagai manajer berfungsi

sebagai otorisator dan dilimpahi fungsi ordonator untuk memerintahkan pembayaran. Namun, tidak dibenarkan melaksanakan fungsi bendaharawan karena berkewajiban melakukan pengawasan ke dalam. Sedangkan bendaharawan, di samping mempunyai fungsi-fungsi bendaharawan, juga dilimpahi fungsi ordonator untuk menguji hak atas pembayaran (Rahmat, 2013:98).

Pendidikan membutuhkan pembiayaan yang tidak kecil. Biaya pendidikan adalah total biaya yang dikeluarkan baik oleh individu peserta didik, keluarga yang menyekolahkan anak, warga masyarakat perorangan, kelompok masyarakat maupun yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kelancaran pendidikan (Suhardan & Riduwan, 2012:22). Pendapat ini mengindikasikan, keuangan dan pembiayaan pendidikan di madrasah membutuhkan perhatian pemerintah lewat berbagai kebijakannya. Hal ini sangat penting diperhatikan, karena masalah pembiayaan adalah menjadi sarana vital bagi mati hidupnya suatu organisasi sekolah termasuk madrasah (Burhanuddin, 2014:59).

Kenyataan menunjukkan bahwa ketertinggalan madrasah swasta adalah sebagai akibat terbatasnya dana, ditambahnya dengan lemahnya pola dan pengelolaan sistem pembinaan, dengan kebijakan pengelolaan yang masih tradisional. Selain dari itu tata layanan yang tidak kondusif, dimana pengelolaan yang tidak transparan dan kurang akuntabel, termasuk intensitas kerjasama antara komponen terkait yaitu antara pengurus yayasan dengan madrasah, dan orang tua peserta didik, terkesan kurang memberi kontribusi bagi pengembangan madrasah swasta.

Berdasarkan permasalahan yang terdeskripsi di atas, ada beberapa alasan yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini diantaranya kemajuan Madrasah Aliyah Swasta di Kota Gorontalo membutuhkan pengelolaan keuangan dan pembiayaan pendidikan yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik madrasah. Pengelolaan keuangan dan pembiayaan merupakan faktor penting dan strategis dalam kerangka peningkatan kualitas dan kemajuan

madrasah di masa depan. Mengingat inti dari pengelolaan keuangan adalah pencapaian efisiensi dan efektivitas. Oleh karena itu, di samping mengupayakan ketersediaan dana yang memadai untuk kebutuhan pembangunan maupun kegiatan rutin operasional di madrasah, juga perlu diperhatikan faktor akuntabilitas dan transparansi setia penggunaan keuangan, baik yang bersumber pemerintah, masyarakat, maupun sumber-sumber lainnya. Upaya madrasah meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan keuangan dan pembiayaan pendidikan di madrasah harus lebih diprioritaskan pada nilai-nilai kemanfaatannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Mulyono (2010:181) bahwa administrasi keuangan sekolah termasuk madrasah adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan atau diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap biaya operasionalnya sehingga kegiatan pendidikan lebih efektif dan efisien serta membantu pencapaian tujuan pendidikan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologis merupakan penelitian yang berupaya memahami persepsi informan tentang suatu situasi tertentu. Penelitian ini dilakukan di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Kota Gorontalo (MAS Nurul Yaqiin, MAS Al-Huda, MAS Al-Yusra, MAS Al-Khairaat, dan MAS Muhammadiyah Gorontalo). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian ini, adalah semua kepala madrasah Aliyah yang ada di Madrasah Aliyah Swasta Kota Gorontalo yang berjumlah 5 orang yaitu kepala MAS Nurul Yaqiin (KM-MAS01), kepala MAS Al-Huda (KM-MAS02), kepala MAS Al-Yusra (KM-MAS03), kepala MAS Al-Khairaat (KM-MAS04), dan kepala MAS MAS Muhammadiyah (KM-MAS05). Karakteristik informan kesemuanya berjenis kelamin laki-laki dan memiliki masa kerja > 10 tahun. Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan

kesimpulan. Proses analisis data menggunakan pola berpikir induktif yaitu proses pengolahan data dari hal-hal yang khusus dan diperoleh dari informan kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Konseptualisasi dari pernyataan ilmiah juga ditambahkan sebagai kesimpulan dari penelitian.

TEMUAN DAN DISKUSI

Keuangan dan pembiayaan merupakan sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan di Madrasah Aliyah Swasta Kota Gorontalo. Implementasi pengelolaan keuangan dan pembiayaan madrasah aliyah swasta di Kota Gorontalo mengacu pada standar pengelolaan pendidikan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 19 tahun 2007 bidang pengelolaan keuangan dan pembiayaan dalam hal: menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS), mengidentifikasi sumber dana/menggal dana eksternal maupun internal, merealisasikan dana sesuai dengan rencana, pertanggungjawaban keuangan dan evaluasi anggaran dengan hasil temuan sebagai berikut.

1. Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)

Penyusunan RKAS dalam pengelolaan bidang keuangan dan pembiayaan pendidikan harapannya hendaknya dilakukan bersama pihak terkait. Hal ini dilakukan oleh kelima Madrasah Aliyah Swasta di Kota Gorontalo. Sebagaimana realita yang ada di Madrasah Aliyah al-Khairaat bahwa:

“Dalam menyusun RKAS selalu melibatkan pihak terkait seperti komite, dan beberapa orang staf kepala madrasah yang ditunjuk untuk menjadi sebuah tim dalam menyusun RKAS. Kemudian madrasah bekerjasama untuk merembukkan anggaran dengan masyarakat umum ketika akan mengadakan sebuah momen atau kegiatan yang melibatkan mereka”(KM-MAS01).

“Tidak seluruhnya guru/staf ikut serta dalam menyusun RKAS. Biasanya hanya beberapa orang saja yang saya tunjuk sebagai tim seperti beberapa guru, bendahara, TU dan komite. Setelah itu, RKAS kami rembukkan kembali dengan ketua Yayasan untuk mendapatkan

persetujuan. Apabila madrasah akan mengadakan kegiatan yang melibatkan masyarakat umum, maka pembuatan anggaran kami rembukkan bersama-sama”(KM-MAS02).

“Membahas tentang penyusunan RKAS yang menyangkut proses penganggaran biaya pendidikan, prosesnya yang pertama diawali dengan melakukan rapat kerja tahunan bersama anggota rapat. Kemudian, anggota rapat membuat draft anggaran. Dari draft itu kemudian dibuat proposal yang nantinya akan diajukan ke Yayasan untuk disahkan atau disetujui. Alurnya dirapatkan dulu kemudian diajukan ke Yayasan. Setelah disetujui pihak Yayasan kemudian dimasukkan ke dalam RKAS dengan sepengetahuan Yayasan pastinya”(KM-MAS03).

“Dalam proses untuk menganggarkan biaya pendidikan, sebelumnya diadakan rapat kerja akhir tahun terlebih dahulu. Dalam rapat kerja itu ada kepala madrasah, wakil kepala madrasah, komite madrasah, perwakilan guru dan pegawai tata usaha juga ada. Anggota rapat tugasnya membuat draft, kalau draftnya sudah dibuat terus diajukan ke Yayasan. Akan tetapi, nanti harus membuat proposal dulu kalau mau mengadakan kegiatan atau membutuhkan dana untuk keperluan madrasah. Setelah itu, dana baru bisa dicairkan ke madrasah” (KM-MAS04).

“Dalam penyusunan RKAS mengikuti bagaimana alur atau proses pengelolaan pembiayaan pendidikan yang sudah ditentukan oleh pihak Yayasan. Mengingat penyusunannya RKAS sangat penting dilakukan, karena nantinya akan berpengaruh juga pada proses pembelajaran di madrasah. Selain itu, dana yang dianggarkan mempertimbangkan sektor-sektor yang perlu untuk didanai sesuai dengan kebutuhan madrasah” (KM-MAS05).

Berdasarkan pernyataan kelima kepala madrasah di atas, terkait dengan penyusunan RKAS menunjukkan bahwa pihak yayasan memberi kebebasan kepada setiap madrasah untuk menyusun RKAS, dengan membentuk

tim dalam menyusunnya yang terdiri dari kepala madrasah, bendahara, pegawai tata usaha dan beberapa orang guru serta komite madrasah. Sementara pihak yayasan hanya menerima draf anggaran yang sudah disusun oleh setiap madrasah untuk dipertimbangkan.

Dari temuan ini, penulis menilai bahwa langkah ini sangat baik sekali, karena diharapkan dengan melibatkan pihak terkait seperti kepala madrasah, bendahara, pegawai tata usaha dan beberapa orang guru serta komite madrasah, mereka dapat memberikan saran dan masukan demi kemajuan madrasah. Selain itu juga, kondisi seperti ini merupakan suatu ciri madrasah yang menerapkan pola manajemen berbasis madrasah.

2. Mengidentifikasi sumber

dana/menggali dana eksternal maupun internal

Pengelolaan bidang keuangan dan pembiayaan perlu mengidentifikasi sumber dana atau menggali dana eksternal maupun internal. Pada Madrasah Aliyah Swasta Kota Gorontalo sumber dana dihasilkan dari Yayasan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sarana madrasah, pemberian kompensasi/reward dan lain-lain. Sumbangan Orang tua/wali peserta didik dalam bentuk SPP digunakan untuk operasional madrasah setiap harinya. Dan sumber dana dari masyarakat umum serta pemerintah setempat yang didapat dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah melalui berbagai program pemerintah seperti program BOS, PRODIRA, dan program lainnya. Seperti yang telah diungkapkan oleh lima kepala Madrasah Aliyah Swasta Kota Gorontalo sebagai berikut.

“Pembiayaan pendidikan di Madrasah Aliyah al-Khairaat bersumber dari dana BOS, PRODIRA dan iuran SPP. Dana BOS yang dikeluarkan untuk Madrasah Aliyah yaitu sebesar Rp 140.400.000,-/tahun untuk peserta didik, dengan rincian setiap peserta didik menerima dana BOS dengan jumlah Rp 1.200.000/tahun. Kemudian PRODIRA, dana yang diberikan yaitu sebesar Rp. 300.000/ peserta didik setiap tahun, dan untuk uang komite setiap peserta didik dibebankan Rp 25.000,-

/bulan atau Rp 300.000,-/tahun”(KM-MAS01).

Sumber dana untuk Madrasah Aliyah al-Huda bersumber dari masyarakat yang berupa iuran komite, pembayaran iuran SPP peserta didik setiap bulan, Prodira dan dana dari Bantuan Operasional Sekolah. Alokasi dananya macam-macam, yang pasti untuk menunjang kebutuhan madrasah, seperti untuk pengembangan sarana dan prasarana, belanja barang dan jasa, kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan pada saat rapat, dan sebagainya”(KM-MAS02).

Sementara hal yang berbeda dikemukakan oleh kepala Madrasah Aliyah Muhammadiyah bahwa:

“Sumber dana madrasah swasta berasal dari yang pertama tentu saja dari uang SPP setiap bulan yang dibebankan kepada setiap peserta didik, kemudian dari dana bantuan seperti dana BOS dan PRODIRA, kemudian ada dana bantuan dari luar juga (hibah). Namun dengan adanya kebijakan program pendidikan gratis dari Pemerintah Kota Gorontalo, maka untuk pembayaran iuran SPP dari setiap peserta didik dihapuskan, sehingga sumber pendanaan dari madrasah berkurang, tidak sebanding dengan operasional yang dikeluarkan”(KM-MAS03).

“Dengan adanya kebijakan program pendidikan gratis dari pemerintah Kota Gorontalo, maka sumber dana yang awalnya bersumber dari iuran SPP yang dibayar oleh peserta didik setiap bulan dihapuskan, sehingga sumber dana utama saat ini hanya bersumber dari dana dari BOS. Selanjutnya dana dari PRODIRA (program pendidikan rakyat), yang digunakan untuk keperluan sekolah guna memperlancar atau menunjang proses pembelajaran di madrasah”(KM-MAS04).

“Kalau untuk pembiayaan operasional keseharian madrasah dulunya diambil dari pembayaran iuran SPP peserta didik setiap bulannya, namun dengan adanya kebijakan program pendidikan gratis yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota

Gorontalo, maka bentuk sumbangan tersebut tidak ada lagi. Sumber dana utama hanya berharap pada dana BOS. Jumlah dana BOS ini dikeluarkan tergantung banyaknya peserta didik. Jika peserta didiknya banyak, maka dana yang akan dikeluarkanpun jumlahnya besar” (KM-MAS05).

Berdasarkan penelusuran dokumen RKAS pada kelima Madrasah Aliyah Swasta di Kota Gorontalo yang didapati oleh penulis, terlihat bahwa Madrasah Aliyah Swasta di Kota Gorontalo selama ini hanya mengandalkan iuran SPP yang dipungut dari peserta didik setiap bulannya sebagai sumber dananya. Namun adanya kebijakan program pendidikan gratis yang dicanangkan pemerintah Kota Gorontalo pada tahun 2014, membuat setiap madrasah menghapus sumber pembiayaan tersebut. Namun dari kelima madrasah yang ada, masih terdapat dua madrasah yang tetap memberlakukan pungutan iuran SPP kepada setiap peserta didik yaitu Madrasah Aliyah al-Khairaat dan Madrasah Aliyah al-Huda. Sementara ketiga madrasah lainnya yaitu Madrasah Aliyah Muhammadiyah dan Madrasah Aliyah al-Yusra dan Madrasah Aliyah Nurul Yaqin sumber dana utama hanya mengandalkan pada dana BOS. Dana yang diberikan kepada setiap peserta didik sebesar Rp 1.200.000,-/orang setiap tahunnya. Jumlah dana BOS ini dikeluarkan tergantung banyaknya peserta didik. Jika peserta didiknya jumlahnya banyak, maka dana yang akan diterima madrasah jugajumlahnya besar, begitupun sebaliknya jika peserta didik jumlahnya sedikit, maka dana BOS yang diterima juga jumlahnya sedikit.

3. Merealisasikan dana

Setelah menyusun RKAS dan mengidentifikasi sumber dana, langkah selanjutnya adalah merealisasikan dana sesuai dengan yang telah direncanakan. Merealisasikan dana sesuai dengan rencana merupakan kegiatan yang penuh pertimbangan, karena terkadang ketika dilaksanakan madrasah sering dibenturkan dengan kondisi sebenarnya, sehingga akan mengganggu rencana yang sebelumnya telah disusun. Berikut ini hasil wawancara dengan

kepala madrasah pada kelima Madrasah Aliyah Swasta di Kota Gorontalo yang menggambarkan kondisi kelima madrasah tersebut dalam merealisasikan RKAS.

“Tidak semua dari yang direncanakan dalam RKAS, dalam hal ini pengeluaran belanja madrasah, berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Terkadang madrasah mengeluarkan dana untuk hal-hal yang tidak direncanakan sebelumnya. Tetapi apabila hal tersebut cukup penting kami berusaha untuk mewujudkannya. Selain itu, dari siswanya yang membayar iuran SPP, jika telat atau tidak tepat pada waktunya dapat menghambat proses pembiayaan yang ada” (KM-MAS01).

“Dalam merealisasikan dana sesuai dengan yang telah direncanakan pada RKAS, untuk pengeluaran-pengeluaran yang tidak kami duga sebelumnya kami telah menyediakan dana cadangan. Memang, terkadang mengalami kekurangan dana, untuk mengatasi hal tersebut biasanya kami melihat mana yang lebih penting dan lebih bermanfaat itulah yang laksanakan walaupun harus mengorbankan anggaran untuk kegiatan lain” (KM-MAS02).

“Dalam proses merealisasikan anggaran, kadangkala terdapat pembiayaan yang tak terduga terjadi, apalagi madrasah kami hanya mengandalkan dana dari BOS yang sudah jelas diatur penggunaan dan peruntukannya dalam juknis yang mengaturnya. Disamping itu, dalam proses pencairan setiap anggaran, kami harus membuat proposal terlebih dahulu meskipun pada saat rapat penganggaran kami juga membuat proposal. Proposal yang diajukan akan diperiksa oleh Yayasan kemudian apabila proposal tersebut disetujui oleh pihak Yayasan, anggarannya baru bisa dicairkan” (KM-MAS03).

“Seringkali tidak sesuai dengan RKAS yang telah dibuat, dalam penggunaan anggaran berdasarkan proses alurnya, prosesnya juga tidak cepat kami harus menunggu persetujuan Yayasan dulu untuk mengajukan proposal. Proses pencairan

dana yang tidak mudah membuat madrasah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan sesegera mungkin untuk membiayai operasional madrasah”(KM-MAS04).

“Kami pihak madrasah melakukan kerjasama yang baik dengan pihak Yayasan untuk melakukan penganggaran atau melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah dianggarkan. Sehingga, proses pembiayaan pendidikan dapat berjalan dengan lancar. Kalau dilihat dari proses pengeluaran dana memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar, meskipun sebelumnya dana-dana yang ada sudah dialokasikan sebelumnya dan dari pihak Yayasan hanya melakukan pengecekan ulang agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan pembukuan”(KM-MAS05).

Berdasarkan temuan dari hasil wawancara dengan kelima kepala madrasah yang ada di Madrasah Aliyah Swasta Kota Gorontalo yaitu Madrasah Aliyah al-Khairaat, Madrasah Aliyah al-Huda, Madrasah Aliyah Muhammadiyah, Madrasah Aliyah al-Yusra dan Madrasah Aliyah Nurul Yaqin menunjukkan bahwa kelima madrasah tersebut dalam merealisasikan dana/keuangan masih terdapat pengeluaran yang tidak sesuai dengan perencanaan awal yang ada pada RKAS. Terkadang madrasah mengeluarkan dana untuk hal-hal yang tidak direncanakan sebelumnya, dengan menggunakan skala prioritas yaitu mempertimbangkan mana yang lebih penting dan lebih bermanfaat itulah yang dilaksanakan walaupun harus mengorbankan anggaran untuk kegiatan lain. Adanya proses pencairan dana yang tidak mudah, menunggu persetujuan pihak yayasan membuat madrasah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan sesegera mungkin untuk membiayai operasional madrasah.

4. Pertanggungjawaban Keuangan

Keuangan merupakan suatu yang sangat sensitif dalam suatu organisasi pendidikan. Dikatakan sensitif, karena apabila terjadi kerancuan dalam hal keuangan antara rencana, pelaksanaan dan pelaporan, maka hal tersebut akan menimbulkan fitnah yang akhirnya akan timbul rasa saling tidak percaya di dalam

organisasi pendidikan tersebut. Demikian halnya di Madrasah Aliyah Swasta Kota Gorontalo untuk mencegah hal itu, perlu berusaha sebaik mungkin mengelola keuangannya, terutama dalam hal pertanggungjawaban. Berikut hasil wawancara yang dilakukan pada kelima kepala madrasah yang ada di Madrasah Aliyah Swasta Kota Gorontalo terkait pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya sebagai berikut.

“Pertanggungjawaban keuangan yang terdapat RKAS biasanya diberikan kepada ketua yayasan dan komite madrasah. Tetapi untuk laporan kegiatan lain seperti kegiatan akhir tahun serta perayaan hari besar Islam yang melibatkan dana masyarakat umum, kami laporkan kepada semua pihak yang ikut serta dan terlibat dalam acara tersebut seperti orang tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat dan instansi pemerintah setempat”(KM-MAS01).

“Dalam hal pertanggungjawaban keuangan, madrasah ini berusaha melakukan hal tersebut melalui pembukuan itu berguna untuk laporan sementara kepada pihak terkait, tetapi pelaporannya biasanya dilakukan setiap akhir semester sebelum pelaporan secara keseluruhan di akhir tahun, misalnya dalam penggunaan dana BOS kami selalu menyertai bukti dalam setiap transaksi pengeluaran, seperti kwitansi. Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat laporan yang kami buat”(KM-MAS02).

“Sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan yang ada, saya selalu meminta kepada bendahara madrasah untuk membuat pembukuan bulanan sebagai bahan acuan untuk laporan keuangan di akhir semester. Kemudian setiap transaksi keuangan apapun selalu disertai dengan bukti yang sah ketika mereka menggunakan dana madrasah untuk keperluan mereka di madrasah”(KM-MAS03).

“Kami taat pada regulasi, bahwa sumber pendanaan hanya dari BOS saja, kita tidak memiliki sumber lain. Karena ketentuannya setiap sekolah/madrasah

yang ada di Kota Gorontalo tidak boleh memungut biaya dari peserta didik, bahkan setiap pertemuan dengan orangtua/wali peserta didik selalu disampaikan bahwa madrasah kami tanpa pungutan. Untuk penggunaannya pun kita tertuang dalam laporan pertanggungjawaban, jadi kita taat melaksanakan dan melaporkannya. Penanggung jawab keuangan adalah kepala madrasah, kalau pelaksanaan itu adalah bendahara. Dalam laporan pertanggungjawaban dilaporkan sesuai dengan penggunaan anggaran dengan melampirkan bukti-bukti penggunaan anggaran”(KM-MAS04).

“Dalam pertanggungjawaban keuangan berdasarkan anggaran yang ada, besaran dan kegiatan sudah dituangkan dalam DPA, selain itu juga terdapat di RKAS yang disusun pada awal tahun. Kemudian RKAS disahkan menjadi APBS oleh yayasan. Sumber pendapatan dari iuran SPP tidak ada, semuanya menggunakan sumber dari BOS. Sehingga dalam pertanggungjawaban keuangan dan pembiayaan dilakukan secara transparan, karena setiap penggunaan keuangan dilaporkan kepada seluruh warga madrasah dan pihak terkait”(KM-MAS05).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kelima kepala madrasah di atas, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban keuangan diberikan dan dilaporkan kepada ketua yayasan dan komite madrasah. Sedangkan, apabila terdapat kegiatan madrasah yang sumber keuangannya tidak sepenuhnya berasal dari madrasah melainkan dibantu dengan dana lain yang sumbernya dari masyarakat umum atau di luar lingkungan madrasah, maka laporan keuangan diberikan kepada mereka sebagai pihak yang diajak bekerja sama dengan madrasah, seperti tokoh masyarakat dan pemerintah setempat. Selain itu, setiap penggunaan keuangan untuk pembiayaan madrasah, dipertanggungjawabkan disertai dengan bukti yang sah agar dapat dipercaya oleh pihak yang menerima laporan pertanggungjawaban tersebut. Sehingga menurut penulis, pertanggungjawaban

keuangan seperti ini dinilai sangat baik, karena kelima madrasah berusaha menjaga kepercayaan pihak-pihak terkait, seperti guru, komite, yayasan dan lainnya dalam hal pengelolaan keuangan ketika mereka mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran keuangan madrasah dengan bukti yang sah.

5. Mengevaluasi anggaran

Langkah terakhir yang dilakukan oleh setiap sekolah/madrasah untuk menilai anggaran sesuai atau tidak dengan perencanaan awal adalah dengan mengevaluasi anggaran. Madrasah sebagai suatu organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan, hendaknya selalu melakukan evaluasi program terutama anggaran, untuk menilai efektivitas dan kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan. Berikut ini hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan kelima kepala Madrasah Aliyah Swasta yang ada di Kota Gorontalo untuk mendapatkan gambaran mengenai evaluasi anggaran yang dilakukan di masing-masing madrasah dengan hasil temuan sebagai berikut.

“Biasanya kami melakukan evaluasi dalam satu tahun bisa dua kali. Yang pertama setiap akhir semester dan akhir tahun ajaran. Evaluasi ini mengikut sertakan dewan guru, komite dan ketua yayasan”(KM-MAS01).

“Evaluasi biasanya kami lakukan setiap akhir semester. Kurang lebih 6 bulan sekali kami melakukan rapat dengan pihak madrasah untuk menilai program yang berjalan dan merencanakan program lainnya. Disetiap rapat, komite diminta memberikan masukan dan kritikan demi kemajuan madrasah”(KM-MAS02).

“Evaluasi anggaran bahwa madrasah kami selalu mengevaluasi anggaran setiap tahunnya yang dilakukan setiap enam bulan sekali. Kegiatan ini dilakukan sebagai alat efisiensi yaitu dengan adanya kegiatan evaluasi dapat diketahuinya realisasi sebuah kegiatan yang dibiayai, kemudian dapat dibandingkan dengan perencanaan, sehingga dapat dianalisis ada tidaknya pemborosan atau bahkan

adanya penghematan anggaran”(KM-MAS03).

“Hal yang paling penting pada pengelolaan keuangan dan pembiayaan madrasah yaitu kegiatan evaluasi untuk mengetahui pemanfaatan dana secara efektif dan efisien serta mengalokasikan dana secara tepat sesuai kebutuhan melalui rapat evaluasi setiap semester dan setiap akhir tahun. Dalam rapat evaluasi tersebut, setiap madrasah melakukannya bersama dengan komite, dewan guru dan ketua yayasan”(KM-MAS04).

“Untuk mengetahui adanya keterpaduan antara penerimaan keuangan dan pengeluaran keuangan di Madrasah Aliyah Nurul Yaqin, setiap semester dan akhir tahun melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran yang telah dikeluarkan. Proses evaluasi dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara efektif dan seefisien mungkin agar proses pelaksanaan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan”(KM-MAS05).

Berdasarkan hasil wawancara kelima kepala madrasah di atas, terkait evaluasi anggaran didapati bahwa kelima Madrasah Aliyah Swasta di Kota Gorontalo selalu melakukan evaluasi terhadap program dan anggaran yang telah direncanakan. Evaluasi dilakukan sebanyak dua kali dalam satu tahun pelajaran. Dalam rapat evaluasi tersebut, setiap madrasah melakukannya bersama dengan komite, dewan guru dan ketua yayasan. Komite madrasah pun ikut serta dalam evaluasi tersebut dalam memberikan kritik dan masukan untuk madrasah. Hal ini baik sekali, dengan melakukan evaluasi terdapat usaha untuk meningkatkan efektifitas dan efiseinsi anggaran. Karena evaluasi merupakan salah satu alat bagi madrasah untuk meningkatkan mutu pendidikannya.

Berdasarkan temuan data penelitian terkait dengan implementasi pengelolaan keuangan dan pembiayaan pada kelima Madrasah Aliyah Swasta di Kota Gorontalo belum sepenuhnya sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan secara garis besar diperoleh gambaran bahwa aspek penyusunan

pedoman pengelolaan pembiayaan dan keuangan di Madrasah Aliyah Swasta Kota Gorontalo sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Penggunaan anggaran madrasah terkadang terdapat pengeluaran yang tidak sesuai dengan perencanaan awal yang ada pada RKAS. Terkadang madrasah mengeluarkan dana untuk hal-hal yang tidak direncanakan sebelumnya. Namun dalam hal pertanggung jawaban pengelolaan bidang keuangan dan pembiayaan telah dilakukan berdasarkan anggaran yang ada, dengan besaran anggaran dan kegiatan sudah dituangkan dalam DPA, selain itu juga terdapat di RKAS yang disusun pada awal tahun kemudian disahkan menjadi APBS. Sumber pendapatan utama madrasah melalui iuran SPP tidak ada, dengan adanya program pendidikan gratis dari pemerintah Kota Gorontalo semuanya menggunakan sumber dari BOS, meskipun demikian masih terdapat dua madrasah yaitu Madrasah Aliyah al-Khairaat dan Madrasah Aliyah al-Huda yang masih memberlakukan iuran SPP kepada setiap peserta didik. Ditinjau dari segi pertanggungjawaban keuangan dan pembiayaan sudah dilakukan secara transparan, setiap penggunaan keuangan dilaporkan kepada pihak terkait. Sistem pelaporan keuangan madrasah tersebut dilakukan setiap 1 semester sekali atau 6 bulan sekali yaitu pada akhir semester. Sedangkan pencatatannya dilakukan langsung ketika ada pemasukan atau pengeluaran disertai dengan bukti yang sah agar dapat dipercaya oleh pihak yang menerima laporan pertanggungjawaban tersebut. Sedangkan pada evaluasi anggaran didapati bahwa kelima Madrasah Aliyah Swasta di Kota Gorontalo selalu melakukan evaluasi terhadap program dan anggaran yang telah direncanakan yang dilakukan sebanyak dua kali dalam satu tahun pelajaran. Dalam rapat evaluasi tersebut, setiap madrasah melakukannya bersama dengan komite, dewan guru dan ketua yayasan.

Berdasarkan temuan hasil penelitian yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan bidang pembiayaan dan keuangan adalah dipengaruhi oleh faktor kebijakan pemerintah dan perencanaan keuangan yang

kurang matang. Menurut kepala Madrasah Aliyah al-Khairaat bahwa:

“Faktor kebijakan pemerintah yang berubah-ubah, berganti pimpinan berdampak pula pada perubahan kebijakan, adanya perencanaan yang kurang matang, dalam merealisasikan dana/keuangan masih terdapat pengeluaran yang tidak sesuai dengan perencanaan awal yang ada pada RKAS. Di samping itu, kurangnya dukungan dari orang tua. Orang tua peserta didik terkadang kurang mendukung sepenuhnya baik materi maupun sumbangsih pemikiran. Hal ini dapat terjadi karena sebagian besar pendidikan orang tua peserta didik rata-rata buruh dan memiliki kondisi perekonomian menengah ke bawah” (KM-MAS01).

“Keterlambatan siswa dalam pembayaran SPP dan tidak lancar turunnya dana bantuan dari pemerintah yaitu dana BOS. Sebagian siswa terkadang terlambat dalam pembayaran SPP, sehingga lebih banyak pembiayaan madrasah yang mengandalkan subsidi dari pemerintah. Sementara subsidi dari pemerintah yang berupa dana BOS yang turunnya tidak lancar akan mengurangi keefektifan pembiayaan” (KM-MAS02).

“Proses pencairan dana yang tidak mudah membuat madrasah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan sesegera mungkin untuk digunakan membiayai operasional madrasah. Selain itu, belum adanya kewenangan sepenuhnya yang diberikan bendahara madrasah dalam mengelola dana pendidikan menyebabkan madrasah perlu menunggu dana cair atas persetujuan dari Yayasan kemudian baru digunakan oleh pihak madrasah. Lamanya proses pencairan dana ini adalah selama kurang lebih 1 bulan” (KM-MAS03).

Faktor penghambat lainnya dipengaruhi oleh adanya program pendidikan gratis. Menurut salah seorang kepala madrasah bahwa:

“Program pendidikan gratis. Program ini tidaklah memberikan solusi yang tepat

dalam kegiatan belajar mengajar. Cairnya dana SG (Sekolah Gratis) yang lambat dan memakan waktu yang cukup lama (3-5 bulanan) dapat mengakibatkan terganggunya kegiatan madrasah, seperti terhambatnya kegiatan ekstrakurikuler, gaji tenaga honorer, pembiayaan administrasi madrasah” (KM-MAS04).

“Pendidikan gratis menjadikan madrasah kurang mendapat dukungan dana dari orang tua, akibatnya tidak tersedia dana yang cukup untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Selain itu kegiatan yang bersifat untuk pengembangan mutu madrasah kurang maksimal. Pendidikan gratis juga menjadikan peran komite madrasah selaku wakil orang tua siswa kurang maksimal karena orang tua siswa tidak ikut mendanai madrasah” (KM-MAS05).

Terkait dengan sumber dana yang dimiliki Madrasah Aliyah Swasta di Kota Gorontalo, berdasarkan temuan hasil penelitian yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan bidang pembiayaan dan keuangan adalah Madrasah Aliyah Swasta di Kota Gorontalo selama ini hanya mengandalkan uang SPP yang dipungut dari peserta didik setiap bulannya sebagai sumber dananya. Namun adanya kebijakan program pendidikan gratis yang dicanangkan pemerintah Kota Gorontalo pada tahun 2014, membuat setiap madrasah menghapus sumber pembiayaan tersebut. Namun dari kelima madrasah yang ada, masih terdapat dua madrasah yang tetap memberlakukan pungutan iuran SPP kepada setiap peserta didik yaitu Madrasah Aliyah al-Khairaat dan Madrasah Aliyah al-Huda. Sementara ketiga madrasah lainnya yaitu Madrasah Aliyah Muhammadiyah dan Madrasah Aliyah al-Yusra dan Madrasah Aliyah Nurul Yaqin sumber dana utama hanya mengandalkan pada dana BOS. Jumlah dana BOS ini dikeluarkan tergantung banyaknya peserta didik. Jika peserta didiknya jumlahnya banyak, maka dana yang akan diterima madrasah juga jumlahnya besar, begitupun sebaliknya jika peserta didik jumlahnya sedikit, maka dana BOS yang diterima juga jumlahnya sedikit. Oleh karena itu, dapat

dikatakan bahwa salah satu faktor yang menghambat Madrasah Aliyah Swasta di Kota Gorontalo dalam pengelolaan bidang keuangan dan pembiayaan dipengaruhi oleh faktor kebijakan pemerintah.

Berdasarkan temuan hasil penelusuran dokumen yang diperoleh dari kelima kepala madrasah yang ada pada Madrasah Aliyah Swasta di Kota Gorontalo adalah dalam merealisasikan dana/keuangan masih terdapat pengeluaran yang tidak sesuai dengan perencanaan awal yang ada pada RKAS. Terkadang madrasah mengeluarkan dana untuk hal-hal yang tidak direncanakan sebelumnya. Hal ini menurut penulis, mengisyaratkan bahwa terdapat perencanaan keuangan yang belum matang. Akibatnya kelima madrasah tersebut harus menyediakan dana tambahan dan ketika dana tambahan tersebut tidak mencukupi, madrasah ini akan menilai mana pengeluaran yang dianggap lebih penting, sehingga terdapat suatu pengeluaran atau kegiatan yang akan dikorbankan guna menutupi dan menambah pengeluaran yang tidak direncanakan tersebut. Pengeluaran yang tidak sesuai dengan rencana juga akan mengakibatkan para guru dan staf akan merasa kesulitan dalam menjalankan program mereka, baik ketika mereka menjalankan program sekolah ataupun ketika menjalankan program pembelajaran. Karena bagaimanapun keperluan para guru dan staf juga harus disediakan oleh pihak sekolah.

Permasalahan seperti ini menurut penulis, bisa diakibatkan karena kurangnya sumber dana yang dimiliki oleh kelima Madrasah Aliyah Swasta yang ada di Kota Gorontalo. Dengan demikian prinsip efektifitas dan efisien belum dipenuhi dalam pengelolaan bidang keuangan dan pembiayaan di Madrasah Aliyah Swasta Kota Gorontalo, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Hal ini juga menunjukkan bahwa kelima Madrasah Aliyah Swasta di Kota Gorontalo belum dapat menentukan secara pasti kebutuhan mereka sesuai dengan skala

prioritas dan kemampuan mereka ketika perencanaan anggaran disusun. Oleh karena itu salah satu faktor yang menghambat Madrasah Aliyah Swastadi Kota Gorontalo dalam pengelolaan bidang keuangan dan pembiayaan dipengaruhi oleh faktor perencanaan keuangan yang kurang matang.

Berdasarkan temuan hasil penelitian terkait faktor penghambat pengelolaan bidang pembiayaan dan keuangan di Madrasah Aliyah Swasta Kota Gorontalo diperoleh gambaran dipengaruhi oleh faktor (a) perencanaan keuangan yang kurang matang; (b) kebijakan pemerintah dan yayasan; (c) proses atau alur pencairan dana yang tidak mudah; (d) adanya program pendidikan gratis; (e) kurangnya dukungan dari orang tua

Berdasarkan temuan penelitian yang didapat dari hasil wawancara kelima kepala Madrasah Aliyah Swasta di Kota Gorontalo bahwa salah satu faktor penghambat madrasah dalam pengelolaan bidang keuangan dan pembiayaan, karena sumber dana utama tergantung dari kebijakan pemerintah, dimana madrasah tidak memiliki kemandirian dalam pengelolaan keuangan dan pembiayaan, tergantung pada kebijakan pemerintah. Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Fattah (2007:23) bahwa dalam pembiayaan pendidikan ada semacam tarik ulur antara peningkatan kualitas dengan pemerataan pendidikan. Dalam hal ini pemerintah akan sangat memerlukan pemikiran yang mendalam untuk menemukan jalan keluar yang akan ditempuh sebagai wujud usaha peningkatan mutu pendidikan melalui sokongan dana, karena peningkatan mutu pendidikan harus melalui peningkatan proses pembelajaran di dalam kelas, dan proses pembelajaran di kelas akan bermutu, jika ada pembiayaan tinggi yang terorganisir.

Lebih ironis lagi sebagian besar guru pada kelima madrasah tersebut masih berstatus guru honorer dan honoraria rata-rata sebesar Rp. 7.000/jam. Hal ini dapat menyebabkan guru atau staf yang bekerja di Madrasah Aliyah Swasta Kota Gorontalo akan mencari pekerjaan tambahan untuk membiayai kehidupan dirinya dan keluarganya. Dan

ketika itu terjadi, guru dan staf tersebut akan terbagi waktu, tenaga dan pekerjaannya ditempat lain, sehingga ada kemungkinan mereka akan mangkir atau tidak hadir untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya di sekolah, apalagi ketika pekerjaan di tempat lain tersebut lebih menjanjikan dari segi gaji atau kesejahteraan, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Made Pidarta bahwa kesejahteraan ini tidak boleh dilalaikan oleh para manajer pendidikan, mereka tidak pada tempatnya hanya menekankan kepada tugas pekerjaan saja, kesejahteraan personalia juga perlu diperhatikan. Adakalanya kehidupan keluarga tenaga-tenaga kependidikan membuat mereka merasa gelisah. Bila hal ini terjadi sudah tentu dapat mempengaruhi cara kerja mereka. Lebih-lebih para pegawai yang masih junior dengan gaji kecil. Pendapatan personalia adalah merupakan faktor penting. Ia merupakan salah satu faktor penentu produktivitas dikalangan para guru. Ini berarti bila pendapatan mereka kecil maka produktivitas pendidikan di madrasah juga akan kecil, sebaliknya bila pendapatan mereka besar maka produktivitas itu pun akan besar pula. Oleh karena itu, faktor gaji atau pendapatan ini juga yang menjadi indikator guru mengajar di tempat lain, berdasarkan data yang ada terdapat guru mengajar pada dua tempat lainnya. Sebagian besar guru membagi waktu dan tempat kerjanya sehingga mereka sering mangkir atau tidak disiplin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu dalam merealisasikan anggaran, penghambat dalam pembiayaan pendidikan pada kelima madrasah yaitu adanya alur atau proses pencairan dana yang cukup lama dengan waktu kurang lebih 1 bulan, sehingga menghambat madrasah untuk memenuhi kebutuhan atau kegiatan yang bersifat insidental.

Dengan demikian menurut penulis dalam upaya pengelolaan bidang keuangan dan pembiayaan adalah perlu adanya perhatian pemerintah terhadap anggaran pendidikan yang diberikan secara adil dan proporsional. Di samping itu Kementerian Agama, juga perlu mengalokasikan dana pendidikan lebih besar, agar bisa sejajar dengan sekolah umum.

Selanjutnya pemerintah juga konsisten memenuhi kewajibannya melaksanakan Pasal 31 Ayat (4) UUD, yaitu menggabungkan biaya pendidikan minimal 20 % dari total anggaran negara/daerah, sehingga kendala-kendala yang selalu menghambat kemajuan dunia pendidikan, terutama madrasah aliyah bisa teratasi. Untuk meningkatkan kesejahteraan guru dari faktor rendahnya penggajian yang diberikan, alangkah lebih baiknya, apabila pihak madrasah bekerja sama dengan yayasan untuk membuat sebuah badan usaha yang hasil pendapatannya dijadikan sebagai tambahan sumber dana untuk keperluan operasional mereka termasuk menjamin kesejahteraan para guru dan stafnya. Agar madrasah memiliki sumber dana mandiri dan memiliki kemandirian dalam pengelolaan keuangan dan pembiayaan, tidak tergantung pada kebijakan pendidikan, menurut penulis setiap madrasah perlu membuat perencanaan sumber keuangan dari eksternal madrasah. Diantaranya pembuatan proposal kerjasama dengan maksud memperkuat jalinan penyandang dana, mengadakan pertemuan dengan alumni dalam rangka menggalang dana, dan sebagainya. Hal terpenting dalam merealisasikan anggaran adalah bagaimana agar dana dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien, dialokasikan dengan tepat sesuai dengan skala prioritas dan dapat mendukung semua penyelenggaraan proses pendidikan yang ada di masing-masing madrasah.

Upaya di atas, sejalan dengan pendapat dikemukakan yang Siagian (2009:133) bahwa untuk memajukan sekolah swasta karena minimnya anggaran yang dimiliki, pemerintah perlu memberikan bantuan dalam bentuk (a) penempatan guru negeri yang dipekerjakan, (b) bantuan khusus untuk pembangunan gedung dan peralatan serta (c) uang rutin untuk kebutuhan rutin, bantuan ini mungkin berbentuk sumbangan, bantuan atau subsidi. Sumbangan dapat diberikan secara insidental guna menutup sebagian kecil kebutuhan rutin, sedangkan bantuan dapat diberikan berdasarkan jumlah peserta didik, serta subsidi diberikan untuk menutup semua pengeluaran rutin sekolah.

Demikian halnya pendapat yang dikemukakan oleh Mulyasa (2013:193) bahwa sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, yang menyerahkan masalah pendidikan ke daerah dan sekolah masing-masing, maka masalah keuanganpun menjadi kewenangan yang diberikan secara langsung dalam pengelolaannya kepada sekolah. Dalam hal ini, kepala madrasah memiliki tanggungjawab keuangan madrasah. Maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keuangan madrasah tersebut. Untuk menjadi kepala madrasah yang profesional dituntut kemampuan mengelola keuangan madrasah. Menurut Dormitzer & Nunes (2007) hal ini memerlukan kebijakan yang selalu berfokus pada bagaimana untuk mengalokasikan dan menyeimbangkan sumber daya yang terbatas. Diperlukan adopsi kebijakan-kebijakan yang mengadopsi terhadap proses yang mengarah pada pencapaian komitmen dan tujuan pengembangan Madrasah Aliyah Swasta di Kota Gorontalo.

KESIMPULAN

Pengelolaan keuangan dan pembiayaan, aktivitas-aktivitas pemicu biaya pendidikan pada tingkat madrasah harus dapat teridentifikasi dengan baik, ketika kekhasan dalam penyelenggaraan pendidikan tingkat madrasah memungkinkan adanya perbedaan dengan pembiayaan pada tingkat yang sama. Perhitungan alokasi biaya pendidikan (pembiayaan pendidikan) harus dilakukan seakurat mungkin sesuai dengan komponen kegiatan pendidikan dan biaya satuan, apabila sudah dilakukan maka menganalisis semua penggunaan biaya pendidikan menjadi langkah yang tidak bisa ditinggalkan. Pengelolaan keuangan dan pembiayaan madrasah sesuai dengan standar pengelolaan yang diharapkan adalah salah satu solusi yang jitu dalam rangka membentuk kemandirian madrasah dalam merencanakan pengembangan madrasah sesuai dengan kondisi riil keuangan dan pembiayaan yang dibutuhkan madrasah. Mengingat saat ini terjadi persaingan yang semakin kompetitif dari sekolah-sekolah umum lainnya yang terus memperbaiki kualitasnya, sehingga tidak jarang masyarakat hanya memandang sebelah mata pada madrasah.

REFERENSI

- Burhanuddin. (2014). *Analisis administrasi, manajemen dan kepemimpinan pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP). (2013). *Madrasah Education Financing in Indonesia*. Jakarta: Agency for Research and Development (BALITBANG).
<https://www.adb.org/sites/default/files/publication/176611/ino-madrasah-education-financing.pdf>
- Fattah, Nanang. (2007). *Landasan manajemen pendidikan*. Bandung: Rosdakarya.
- Mulyasa. (2013). *Menjadi kepala sekolah profesional dalam konteks sukseskan MBS dan KBK*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyono. (2010). *Konsep pembiayaan pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nugraha, M.S., & Rohayani, A. (2016). The role of madrasah supervisor in sustaining management of quality madrasah aliyah. *Advances in Economics, Business and Management Research 6th International Conference on Educational, Management, Administration and Leadership (ICEMAL2016) Published by Atlantis Press*, 14, 201-209.
- Dormitzer, H., & Nunes, R.G. (2007). *Financial management review: Municipal Data Management and Technical Assistance Bureau*. Massachusetts Department of Revenue Town of Dartmouth.
- Rahmat, Abdul. (2013). *Manajemen pendidikan Islam*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Rusman. (2011). *Manajemen kurikulum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siagian, Harbangan. (2009). *Administrasi pendidikan*. Semarang: Satya Wacana.
- Suhardan, D., & Riduwan. (2012). *Ekonomi dan pembiayaan pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2012.